

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Pada penelitian ini, *grand theory* yang menjadi landasan kajian teori yang digunakan adalah Ilmu Pertahanan. Teori Ekonomi Pertahanan, Ekonomi Regional dan Teori Perubahan Struktur Ekonomi menjadi *middle range theory*, sedangkan Pendapatan Nasional, Anggaran Pertahanan, Kerentanan Negara dan Investasi merupakan *applied theory*. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang relevan, yaitu penelitian yang mengkaji pengaruh pendapatan nasional, anggaran pertahanan dan kerentanan negara terhadap investasi asing langsung.

2.1.1. Pertahanan Negara

Berdasarkan tinjauan yang dikemukakan oleh Syarifudin Tipe (2016), secara ontologi ilmu pertahanan mencerminkan perilaku negara untuk menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, bahwa ilmu pertahanan adalah ilmu tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan pertahanan negara. Secara epistemologi, keberadaan ilmu pertahanan diperoleh melalui penelitian ilmiah dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan gabungan keduanya. Sedangkan secara aksiologis, ilmu pertahanan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pengembangan kebijakan pertahanan suatu negara. Artinya ilmu pertahanan menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk menyelenggarakan pertahanan negara.

Secara teoritis, bagi ilmu pertahanan, konsep keamanan khususnya keamanan manusia, dapat diposisikan sebagai *grand theory* untuk ikut memberikan kontribusi pada upaya perdamaian dunia. Dalam posisi yang demikian pun dapat memberikan legitimasi keilmuan bahwa ilmu pertahanan dapat secara mandiri mengembangkan konsep-konsep dan

teori-teori berdasarkan prinsip-prinsip ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang melekat pada ilmu pertahanan. Hal ini berarti posisi ilmu pertahanan tidak harus dikategorikan dengan menginduk atau merupakan bagian ilmu lain, seperti ilmu politik atau bagian dari ilmu atau studi hubungan internasional, apalagi bagian dari ilmu militer (Tippe, 2016).

Hal tersebut sejalan seperti diungkapkan Suprianto (2014), bahwa ilmu pertahanan tidak hanya membahas strategi atau ilmu militer yang didefinisikan sebagai "*the study of the ways, means, as well as the whys, of military affairs*", dan bukan hanya mempelajari penggunaan sarana angkatan bersenjata untuk memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan politik suatu negara. Ilmu pertahanan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya nasional pada masa damai, mempersiapkan secara dini sumber daya nasional termasuk komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Konsep ilmu pertahanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana negara menyikapi ancaman dan tantangan, khususnya di bidang ekonomi, dengan penguatan ekonomi nasional melalui penerimaan investasi asing langsung demi menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara.

2.1.2. Ekonomi Pertahanan

Dalam definisi ekonomi pertahanan menurut *Britannica Encyclopedia* adalah manajemen ekonomi nasional yang terkait dengan dampak ekonomi dari belanja militer, manajemen ekonomi pada masa perang, dan manajemen anggaran pertahanan pada masa damai. Michael D Intrigator dalam Yusgiantoro (2014) menjelaskan bahwa isu-isu yang terkait dengan ekonomi pertahanan, antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam dan luar negeri, pertimbangan mengenai eksistensi dan besaran lingkup pertahanan, kaitan antara belanja pertahanan dengan perubahan

teknologi, dan implikasi belanja pertahanan dalam lingkup pertahanan dalam rangka kestabilan atau ketidakstabilan internasional.

Sementara Kodrat Wibowo (FE Unpad) berpendapat bahwa ekonomi pertahanan sebagai suatu multidisiplin ilmu akan membahas alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik yang diterapkan pada topik-topik yang terkait dengan pertahanan. Ekonomi pertahanan sebenarnya merupakan bidang ilmu yang luas dan isunya sangat beragam. Ekonomi pertahanan tidak hanya berbicara mengenai alokasi biaya untuk kebutuhan perang saja, namun juga pengayaan dan pengembangan ekonomi pertahanann dengan melibatkan nilai (*value*) lain, khususnya nilai strategi pertahanan ke dalam analisis ekonomi pertahanan sebagai contoh adalah nilai bela negara, nilai nasionalisme dan patriotisme, nilai keadilan, nilai kejuangan, dan nilai pengabdian. Cakupan yang luas itulah yang membuat ekonomi pertahanan bersifat multi disiplin.

Dengan demikian, dari sejumlah pengertian diatas, bahwa ekonomi pertahanan tidak hanya menyangkut alokasi anggaran pertahanan pada masa damai dan masa perang, namun juga terkait nilai (*value*) lain yang dapat dihasilkan dari anggaran pertahanan. Dalam penelitian ini mencoba mengetahui dampak dan pengaruh dari belanja militer kepada ekonomi negara.

2.1.3. Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang pembahasannya memasukan unsur perbedaan potensi satu wilayah dnegan wilayah lain. Ilmu ekonomi regional menganalisis suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat memppercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. (DS Prisyarsono, 2007).

Pendefinisian suatu wilayah (*region*) bukanlah suatu hal yang mudah bahkan dapat dikatakan sangat sulit. Menurut Glasson (1977) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah. Pertama, cara pandang subjektif tentang wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu dan tujuan tertentu. Dengan demikian banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah dalam konteks ini hanyalah suatu model agar dapat membedakan lokasi yang satu dari lokasi yang lainnya. Kedua, cara pandang objektif tentang wilayah, menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah. Wilayah bisa dibedakan berdasarkan musim atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari lokasi lainnya. Dengan menggunakan pandangan objektif, membuat jenis analisis atas ruang menjadi terbatas. Dalam rangka kepentingan analisis ekonomi regional maka pandangan subjektif lebih sering digunakan karena dapat disesuaikan dengan tujuan analisis, seperti pendefinisian wilayah berdasarkan kesatuan daerah ekonomi, daerah administratif maupun berdasarkan kesatuan yang bersifat historis.

Menurut Hanafiah (1982) wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut. Menurut Robinson (2003) definisi wilayah adalah suatu kesatuan ruang secara geografis yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya. Budiharsono (2001) mendefinisikan wilayah sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah juga dapat diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau fungsional (Adisasmita, 2005).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang memasukan unsur lokasi ke dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi regional digunakan untuk menganalisis kondisi suatu wilayah dengan menekankan analisisnya pada aspek-aspek sosial ekonomi dan geografi.

2.1.4. Perubahan Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada atau tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, peningkatan dalam pendapatan serta kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006 dalam Louhenapessy, 2014).

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dapat diartikan juga sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Pembangunan di Indonesia telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang kemudian juga ditandai terjadinya perubahan struktur perekonomian. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan (3) pangsa sector tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Transformasi structural perekonomian dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan,

dan perekonomian itu pun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian pertanian tradisional yang berpusat di daerah pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri modern yang berorientasi pada pola kehidupan perkotaan (Lewis dalam Todaro dan Smith).

2.1.5. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu Negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Oleh karena itu pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional (Basmar et al., 2021).

Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Pendapatan Nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa atau negara. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Konsep ini biasanya dikenal dengan sebutan pendapatan per kapita. Meskipun pendapatan per kapitanya belum menggambarkan tingkat kemajuan seluruh rakyat.

Terdapat jenis-jenis pendapatan nasional, yakni: Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu periode; Produk Nasional Bruto (PNB), meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara (nasional) selama 1 periode; Produk Nasional Neto (NNP) adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian; Pendapatan Nasional Netto (NNI) adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi; Pendapatan orang pribadi adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya; dan pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) yang merupakan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari penghasilan orang pribadi setelah dikurangi dengan pajak langsung.

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pendapatan dalam menghasilkan barang dan jasa selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (national income). Pada penelitian ini, menggunakan data pendapatan nasional (*Gross National Income/GNI*) dari *World Bank*, dengan indikator *current \$US*. *World Bank* mendefinisikan pendapatan nasional sebagai jumlah nilai tambah oleh semua penduduk produsen ditambah produk pajak (dikurangi subsidi) yang tidak termasuk dalam penilaian output ditambah penerimaan bersih dari pendapatan primer (kompensasi karyawan dan pendapatan properti) dari luar negeri.

2.1.6. Anggaran Pertahanan

Anggaran pertahanan/belanja pertahanan adalah biaya untuk membangun kekuatan pertahanan dalam masa perang dan damai. Belanja pertahanan pada dasarnya untuk biaya pembayaran gaji personel

pertahanan, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya sarana pertahanan dalam kurun waktu tertentu. Belanja pertahanan selalu terkait dengan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pertahanan dan keamanan, serta kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi dinamika ancaman yang dihadapi suatu negara. Belanja pertahanan sebenarnya merupakan *input* dalam suatu sistem pertahanan keamanan di mana *output*-nya adalah kinerja dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional, memenangkan peperangan, dan memiliki kemampuan untuk meredam berbagai ancaman (Yusgiantoro, 2014).

Dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia, tujuan pengeluaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara. Menurut Kunio (1999) dikutip dalam Ramadhana (2016), pengeluaran belanja militer merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran yang digunakan dalam sistem pertahanan sebuah negara. Perbelanjaan militer merupakan suatu yang sangat penting bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

2.1.7. Kerentanan Negara

Konsep 'kegagalan negara' muncul selama tahun 1990-an dan mengartikan bahwa negara tersebut sama sekali tidak mampu mempertahankan dirinya sebagai anggota masyarakat internasional (Helman & Rather, 1993 dikutip dalam Di John, 2013). Dekade berikutnya konsep 'kegagalan' menjadi konsep utama yang digunakan dalam wacana ketidakstabilan negara, dan tahun-tahun berikutnya konsep kerentanan (*fragile*) mendapat lebih banyak perhatian dengan keunggulannya mengandung berbagai tingkat ketidakstabilan. Kerentanan juga termasuk pandangan bahwa ketidakmampuan negara untuk menyediakan fungsi dasar bagi warganya, juga kemampuan pemerintah untuk menjaga keadaan berfungsi dan stabil (Di John, 2010 dikutip dalam Sternhall, 2016).

Data terkait indeks kerentanan negara (*fragile states index*) pada penelitian ini menggunakan data *Fragile States Index* (FSI) yang diterbitkan oleh *Fund for Peace* sejak tahun 2005. Daftar tersebut bertujuan untuk menilai kerentanan negara terhadap konflik atau kekacauan, dengan memberikan peringkat kepada semua negara-negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringkat didasarkan pada jumlah skor untuk 12 indikator (lihat di bawah). Setiap indikator dinilai pada skala 0 sampai 10, dengan 0 adalah intensitas terendah (paling stabil) dan 10 adalah intensitas tertinggi (paling tidak stabil), menciptakan skala yang mencakup 0 hingga 120 (dapat dilihat pada lampiran hal. 91).

Pemeringkatan indeks kerentanan negara didasarkan pada dua belas indikator kerentanan negara, dikelompokkan berdasarkan kategori: Kohesi, Ekonomi, Politik, dan Sosial. Dipertimbangkan bersama dalam indeks, indikator-indikator tersebut merupakan cara untuk menilai kerentanan suatu negara terhadap keruntuhan atau konflik, memeringkat negara-negara bagian pada spektrum kategori yang diberi label dapat bertahan, stabil, peringatan, dan waspada.

Faktor-faktor yang digunakan *Fund for Peace* untuk menentukan kerentanan suatu negara yakni: kohesi mencakup aparat keamanan, para elit yang difraksionalisasi, dan keluhan kelompok; ekonomi mencakup kemunduran ekonomi, pembangunan ekonomi yang tidak merata, pelarian modal manusia; politik mencakup legitimasi negara, pelayanan publik, HAM dan supremasi hukum; serta sosial yang mencakup tekanan demografis, pengungsi dan pengungsi internal, dan intervensi eksternal.

2.1.8. Investasi Asing Langsung

Penanaman modal/investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*) merupakan dana-dana investasi yang langsung digunakan untuk menjalankann kegiatan bsisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan

mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya (Todaro, 2000). Istilah *foreign direct investment*/FDI atau investasi asing langsung sengaja dimunculkan untuk membedakannya dari investasi portofolio, dimana dana investasinya tidak secara langsung digunakan untuk kegiatan bisnis, yakni digunakan untuk membeli saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.

Investasi asing langsung menurut Jhingga (2004) dikutip dalam Rahajeng, (2015), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta dari luar negeri atau dapat dikatakan penanaman modal dari suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah pemilik modal. Setidaknya ada tiga keuntungan yang didapat dari aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) yaitu : (1) sebagai sarana mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan diversifikasi melalui investasi, (2) memberikan spread terbaik untuk pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas dalam integrasi pasar modal dan, (3) arus modal secara global membatasi kemampuan pemerintah untuk membentuk kebijakan yang kurang tepat. *Foreign Direct Investment* (FDI) ini tidak hanya membawa aliran modal saja ke dalam suatu negara namun juga memperkaya negara bersangkutan, mendorong terjadinya pertukaran ketrampilan manjerial dan masuknya teknologi – teknologi baru dari negara pemilik modal ke negara penerima modal sehingga dengan adanya *Foreign Direct Investment* (FDI) ini turut membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Krugman (1991) yang dimaksud dengan investasi asing langsung adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan diluar negeri. Sementara Todaro (2000) berpendapat bahwa Penanaman Modal Swasta Asing secara langsung (*Foreign Direct Investment*) merupakan dana-dana investasi yang langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan,

membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya.

Menurut pendapat Keynes tentang investasi menyatakan bahwa investasi bergantung pada tingkat bunga, biaya penggunaan dan besar keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan disebut MEC (*Marginal Efficiency of Capital*) merupakan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan (*expected return*) atas pengeluaran modal tambahan. Namun Keynes juga mengemukakan bahwa suku bunga bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi investasi, ada faktor lain yang berpengaruh terhadap investasi yaitu situasi perekonomian. Menurut Busari (2006) terdapat dua indikator untuk menilai bagaimana volatilitas modal asing yang masuk dengan implementasi kebijakan pemerintah, indikator yang pertama adalah makro ekonomi, seperti GDP, kebijakan fiskal, inflasi, suku bunga, nilai tukar, neraca pembayaran dan lain-lain. Dan indikator yang kedua adalah kualitas pemerintah itu sendiri. dalam penelitian Agung (2014) yang berjudul "Faktor Penentu FDI di Negara Berkembang (India, Indonesia, Korsel, Malaysia, Mexsico, Philipine, Thailand dan Turki) periode 2000-2010 " menunjukkan hasil bahwa GDP, DEBT (hutang luar negeri) dan Opennes memiliki peran yang signifikan terhadap FDI. DEBT (hutang luar negeri) yang memiliki pengaruh negatif.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa investor mengharapkan pengembalian hasil (*return*) yang optimal dari investasi yang ditanamkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka investor kerap memperhatikan faktor-faktor resiko (*risk*) yang akan diterima di tempat tujuan investasi dilakukan.

2.1.9. Kaitan Antara Variabel Bebas dan Terikat

2.1.9.1. Pendapatan Negara

Salah satu faktor fundamental masuknya investasi asing di suatu negara adalah indikator makro ekonomi. Trespsta dan Yu (1988) yang dikutip oleh Sarwedi (2002), menyatakan bahwa salah satu faktor penentu

masuknya investasi asing langsung di suatu negara yakni ukuran pasar (*market size*) yang diukur dengan *Gross Domestic Product* (GDP)/Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. PDB mengukur dua hal pada saat bersamaan, yaitu total pendapatan semua penduduk dalam perekonomian dan total belanja negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. PDB dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan kedua hal tersebut benar-benar sama. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran (Mankiw, 2007).

Ekonomi yang kuat menyiratkan sebuah pengembalian yang lebih tinggi bagi investor asing dalam pengingkatan investasi. Dengan tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan hal ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi yang masuk ke dalam suatu negara. Arus masuk investasi asing langsung memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan transfer teknologi, produktivitas perusahaan domestik dan kebutuhan modal finansial menciptakan kesempatan kerja dan oleh karena itu mengarah pada pertumbuhan ekonomi.

2.1.9.2. Anggaran Pertahanan

Pemerintah mengalokasikan belanja pertahanan untuk mendukung upaya-upaya pertahanan negara dengan harapan terciptanya kondisi pertahanan dan keamanan yang stabil. Kondisi dalam negeri yang stabil akan merangsang investasi untuk masuk karena resiko yang diterima investor akan semakin kecil, sehingga dengan situasi negara yang aman maka investor akan berekspektasi untuk mendapatkan *return* yang maksimal sesuai dengan rencana bisnisnya.

2.1.9.3. Kerentanan Negara

Pendapatan nasional yang akan mendorong masuknya investasi juga akan meningkat jika didukung salah satu faktor yakni stabilitas nasional. Negara dengan kestabilan politik dan keamanan yang lebih rendah, lebih mungkin untuk menerima investasi asing langsung yang juga lebih rendah daripada negara dengan kestabilan politik dan keamanan yang lebih tinggi. Investor asing ketika berencana berinvestasi di luar negeri akan mempertimbangkan sejumlah aspek. Investor tidak hanya mempertimbangkan fitur dasar negara tujuan investasi seperti infrastruktur, sumber daya alam, harga faktor, perkembangan keuangan dan kemampuan keuangan untuk pembayaran utang. Investor juga akan mempertimbangkan jaminan pengembalian investasi yang aman, yang pada gilirannya mengarah pada kekhawatiran menyangkut stabilitas keamanan, seperti ketidakpastian politik, terorisme, hingga konflik bersenjata (Aziz & Khalid, 2017). Sedangkan Maizel dan Nissanke (1987) berpendapat bahwa investor FDI membuat keputusan investasi dengan asumsi bahwa negara tuan rumah akan menawarkan keamanan tinggi yang didukung oleh pengeluaran militer yang cukup.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung sehingga dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain:

2.2.1. *The Effect of Government Military Spending on Foreign Direct Investment*

Ani Thakur dari The University of Texas at Austin melakukan penelitian pada November 2021 terkait pengaruh pengeluaran militer pemerintah terhadap investasi asing langsung. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder dengan memanfaatkan data publik yang

tersedia dengan metode regresi multivariat dan menganalisis 123 negara atas fiskal periode tahun 2019. Penelitian menemukan bahwa peningkatan 1 persen dalam pengeluaran militer pemerintah dikaitkan dengan peningkatan sebesar 0,4829 persen dalam investasi asing langsung. Hasil tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 95 persen dan lulus beberapa tes asumsi kesalahan dalam residual. Kesimpulan penelitian tersebut bahwa untuk mendorong peningkatan investasi asing langsung, negara-negara dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan pengeluaran militer.

2.2.2. *Armed Conflict, Military Expenses and FDI Inflow to Developing Countries*

Penelitian yang dilakukan oleh Nusrate Aziz dan Usman Khalid pada tahun 2017 mencoba mengetahui hubungan antara pengeluaran militer dan arus masuk FDI terhadap konflik bersenjata dalam jangka panjang. Peneliti memperkirakan model empiris menggunakan *balance panel consisting* dari 60 negara berkembang pada periode tahun 1990-2003.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran militer tanpa konflik bersenjata mengurangi aliran masuk investasi asing langsung. Peneliti berpendapat bahwa hasil tersebut disebabkan karena biaya militer yang tinggi mengurangi investasi pada infrastruktur fisik, ekonomi dan keuangan negara yang membuat investasi di negara tuan rumah menjadi pilihan yang tidak layak bagi investor asing, serta investasi yang lebih tinggi dalam perangkat keras militer di suatu negara mengirimkan sinyal negatif kepada investor tentang risiko pengembalian investasi yang tidak aman karena potensi ancaman militer.

Sedangkan peningkatan pengeluaran militer dalam menghadapi konflik bersenjata justru meningkatkan aliran masuk investasi asing langsung. Efek ini muncul karena meningkatnya kepercayaan di kalangan investor tentang pengembalian yang aman dari investasi di daerah rawan konflik.

2.2.3. *Military Spending, Economic Growth, and Investment: A Disaggregated Analysis by Income Group.*

Christos Kollias dan Suzanna-Maria Paleologou pada 2016 melakukan penelitian yang membahas hubungan antara pengeluaran militer dengan dua variabel ekonomi makro utama, yaitu tingkat pertumbuhan dan pengeluaran investasi dengan menggunakan kumpulan data *time series* dari 65 negara dan mencakup periode 1971-2014. Metode analisis yang digunakan adalah metodologi *panel vector autoregression* (PVAR). Hasil yang diperoleh bahwa hanya dalam kasus negara berpenghasilan tinggi, pengeluaran militer tampaknya memberikan efek positif pada pertumbuhan dan investasi. Menurut peneliti bahwa temuan tersebut mungkin dapat dikaitkan dengan permintaan efektif dan limpahan teknologi melalui sektor industri pertahanan. Temuan seperti itu tidak ditemukan pada kelompok negara berpenghasilan menengah dan rendah. Hubungan negatif antara investasi dan pengeluaran militer dalam kasus kelompok berpenghasilan rendah sangat mengisyaratkan *trade-off* antara keduanya mengingat bahwa negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi kendala sumber daya yang lebih akut.

2.2.4. *Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya*

Sarwedi pada tahun 2002 melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia selama periode 1978-2001 dengan menggunakan model analisis karakteristik dalam negeri suatu negara yang dikombinasikan dalam periode jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (*ordinary least square = OLS*), dengan mengaplikasikan model koreksi kesalahan (*error correction model=ECM*) dan Uji Kausalitas Grange. Kesimpulan penelitian tersebut bahwa: (1) dalam jangka pendek ditemukan bahwa variabel GDP, pertumbuhan ekonomi (GRWT), upah

pekerja (WG) dan ekspor (X) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerimaan investasi asing di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, seluruh variabel bebas menunjukkan hubungan yang negatif. Hal ini disebabkan karena fluktuasi nilai masing-masing variabel yang mendorong terjadinya perubahan dalam keseimbangan jangka panjang. (2) variabel stabilitas politik (SP) yang diukur dengan menggunakan indikator angka kerusuhan atau pemogokan yang terjadi di Indonesia selama periode penelitian menunjukkan hasil negatif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sesuai dengan asumsi yang dikemukakan oleh Scheider and Frey (1986) bahwa stabilitas politik mempunyai hubungan yang negatif dengan PMA di suatu negara. (3) penelitian ini menemukan hubungan dua arah antara variabel ekspor dan investasi asing langsung pada lag kedua. Sedangkan pada lag kesatu, lag ketiga hanya terdapat hubungan satu arah yaitu antara investasi asing langsung dan ekspor saja. (4) berbeda dengan penelitian sebelumnya, sampai saat ini masih belum ada unsur stabilitas politik (SP) yang dimasukkan dalam variabel penelitian tentang faktor yang mempengaruhi PMA di Indonesia.

2.2.5. Pengaruh Anggaran Pertahanan, Impor Alutsista, Ekspor Alutsista dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1980-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Guntur Eko Saputro, Afif Maulana Rivai dan Meirinaldi tahun 2021 bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari indikator militer dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), World Bank, dan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan periode waktu selama 40 tahun dari 1980 hingga 2019. Penelitian dilakukan dengan metode regresi linear berganda, dengan hasil bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Peneliti berpendapat bahwa

perencanaan pertahanan serta alokasi belanja pertahanan yang tepat setiap tahunnya dapat menopang kekuatan pertahanan sehingga mampu menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 2.1. Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ani Thakur/2021 <i>The Effect of Government Military Spending on Foreign Direct Investment</i>	Pengeluaran militer dan investasi asing langsung.	Regresi multivariat dan menganalisis 123 negara atas fiskal periode tahun 2019	Penelitian menemukan bahwa peningkatan 1 persen dalam pengeluaran militer pemerintah dikaitkan dengan peningkatan sebesar 0,4829 persen dalam investasi asing langsung. Hasil tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 95 persen dan lulus beberapa tes asumsi kesalahan dalam residual.	Variabel pengeluaran militer dan variabel investasi asing langsung.	Metode analisa dan subjek negara yang diteliti.
2.	Nusrate Aziz dan Usman Khalid/2017 <i>Armed Conflict, Military Expenses and FDI Inflow to Developing Countries</i>	FDI, Pengeluaran militer, konflik bersenjata	Memperkirakan model empiris menggunakan <i>balance panel consisting</i>	Peningkatan pengeluaran militer tanpa konflik bersenjata mengurangi aliran masuk investasi asing langsung. Sedangkan peningkatan pengeluaran militer dalam menghadapi konflik bersenjata justru	Variabel aliran FDI dan pengeluaran militer.	Pada penelitian ini konflik bersenjata menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan.

No	Nama/Tahun Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				meningkatkan aliran masuk investasi asing langsung		
3.	Christos Kollias dan Suzanna-Maria Paleologou/2016 <i>Military Spending, Economic Growth, and Investment: A Disaggregated Analysis by Income Group</i>	Pengeluaran militer, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran investasi.	<i>Panel vector autoregression</i> (PVAR)	Hanya dalam kasus negara berpenghasilan tinggi, pengeluaran militer memberikan efek positif pada pertumbuhan dan investasi. Temuan seperti itu tidak ditemukan pada kelompok negara berpenghasilan menengah dan rendah. Hubungan negatif antara investasi dan pengeluaran militer dalam kasus kelompok berpenghasilan rendah sangat mengisyaratkan trade-off antara keduanya mengingat bahwa negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi kendala sumber daya	Menggunakan variabel pengeluaran militer. Menggunakan data dari berbagai negara sebagai subjek penelitian.	Mengelompokkan negara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.

No	Nama/Tahun Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				yang lebih akut.		
4.	Sarwedi/2002 Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya	Investasi asing langsung, pertumbuhan ekonomi, upah pekerja, ekspor, stabilitas politik	Model analisis karakteristik dalam negeri suatu negara yang dikombinasikan dalam periode jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (<i>ordinary least square</i> = OLS), dengan mengaplikasikan model koreksi kesalahan (<i>error correction model</i> =ECM) dan Uji Kausalitas Grange	(1) dalam jangka pendek ditemukan bahwa variabel GDP, pertumbuhan ekonomi (GRWT), upah pekerja (WG) dan ekspor (X) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerimaan investasi asing di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, seluruh variabel bebas menunjukkan hubungan yang negatif. (2) variabel stabilitas politik (SP) yang diukur dengan menggunakan indikator angka kerusuhan atau pemogokan yang terjadi di Indonesia selama periode penelitian menunjukkan	Mempertimbangkan faktor keamanan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi investasi.	Tidak menggunakan variabel pengeluaran militer sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi penerimaan investasi.

No	Nama/Tahun Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				hasil negatif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (3) penelitian ini menemukan hubungan dua arah antara variabel ekspor dan investasi asing langsung pada lag kedua. Sedangkan pada lag kesatu, lag ketiga hanya terdapat hubungan satu arah yaitu antara investasi asing langsung dan ekspor saja.		
5.	Guntur Eko Saputro, Afif Maulana Rivai dan Meirinaldi/2021 Pengaruh Anggaran Pertahanan, Impor Alutsista, Ekspor Alutsista dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1980-2019	Anggaran pertahanan, impor-ekspor alutsista, inflasi, pertumbuhan ekonomi.	Regresi linear berganda	Peneliti berpendapat bahwa perencanaan pertahanan serta alokasi belanja pertahanan yang tepat setiap tahunnya dapat menopang kekuatan pertahanan sehingga mampu menciptakan dan	Menghitung pengaruh anggaran pertahanan terhadap salah satu indikator ekonomi makro. Metode analisis yang digunakan sama.	Subjek yang diteliti hanya Indonesia, tanpa membandingkan dengan negara lain.

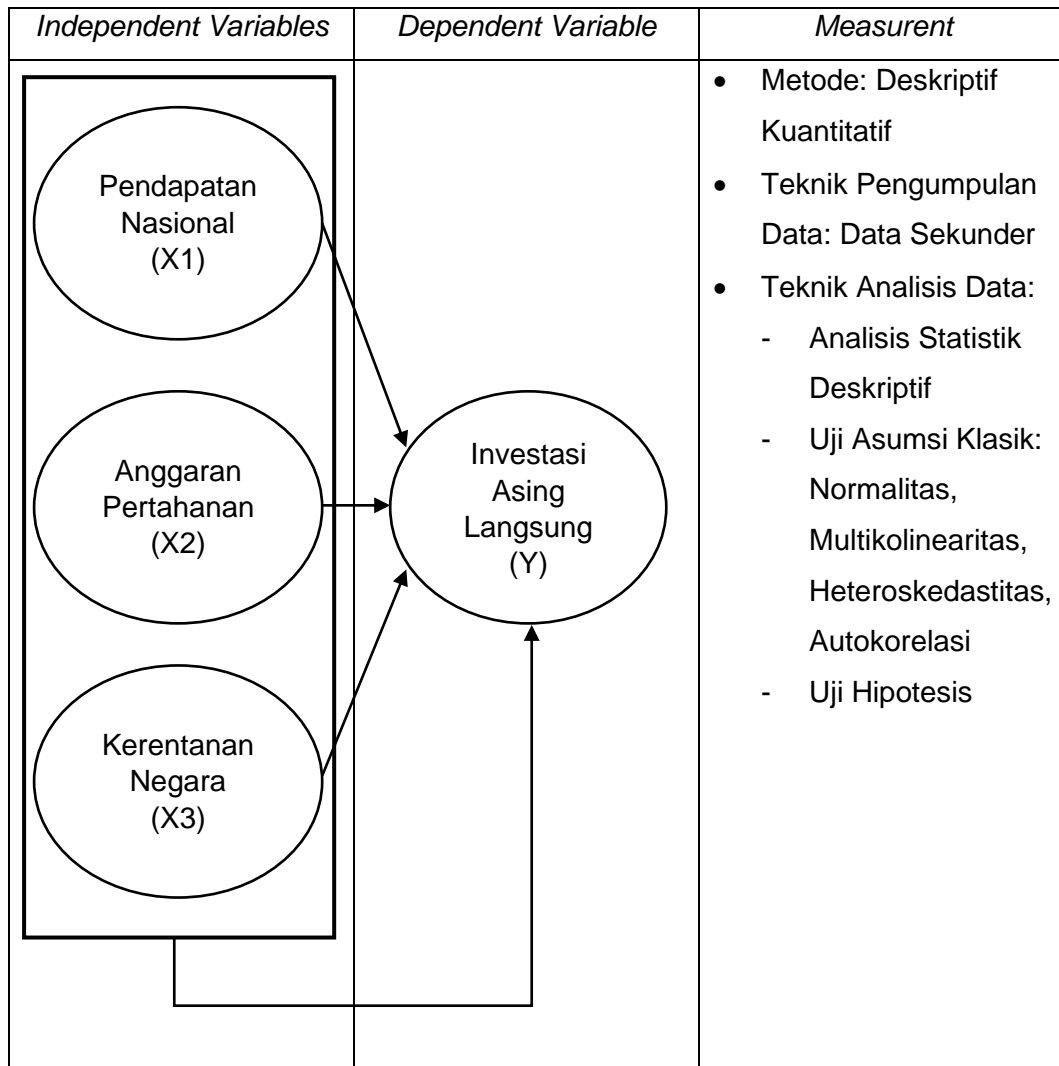
No	Nama/Tahun Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.		

Sumber: Diolah peneliti 2022

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian agar terdapat keselarasan antara latar belakang masalah, teori hingga pembahasan. Kerangka pemikiran ini memudahkan peneliti dalam menyusun data penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari input, proses, *output*, dan *outcome*.

Input dalam penelitian ini yaitu pendapatan nasional negara-negara di kawasan ASEAN, serta anggaran pertahanan dan indeks kerentanan negara. Dari input tersebut, proses penelitian terdiri dari teori dan penelitian terdahulu, dimana proses tersebut menghasilkan *output* berupa hasil penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap investasi asing langsung di kawasan ASEAN, sehingga pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan pertahanan dan perekonomian untuk meningkatkan investasi asing langsung di Indonesia dengan melihat hasil penelitian dari data sejumlah negara di kawasan ASEAN. Ketika kebijakan tersebut dilaksanakan maka akan menghasilkan *outcome* berupa kekuatan bangsa Indonesia yang didukung oleh aspek pertahanan dan ekonomi. Sehingga kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

2.4. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendapatan nasional (X1) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif secara parsial terhadap investasi asing langsung (Y).
- b. Anggaran pertahanan (X2) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif secara parsial terhadap investasi asing langsung (Y).

- c. Kerentanan negara (X3) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif secara parsial terhadap investasi asing langsung (Y).
- d. Pendapatan nasional (X1), anggaran pertahanan (X2), dan kerentanan negara (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap investasi asing langsung (Y).